

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Konteks Penelitian**

Negara Indonesia merupakan suatu organisasi publik yang mempunyai tujuan yang harus dilaksanakan dan tentu mempunyai permasalahan yang harus di atasi, dikurangi, atau di cegah. Permasalahan yang di hadapi oleh suatu negara biasanya muncul dari masyarakat itu sendiri, bisa berasal dari dampak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan. Maka permasalahan - permasalahan publik ini tidak bisa di atasi oleh perorangan dan di samping itu dikehendaki pemecahan secara efektif dan efisien, maka disyaratkan perumusan masalah serta ditetapkannya kebijakan yang di keluarkan oleh negara. Hal ini bermaksud keluarnya suatu kebijakan yang ditetapkan serta di implementasikan dengan baik maka dampak kebijakan yang sudah di tetapkan bisa di rasakan oleh masyarakat termasuk oleh pembuat kebijakan itu sendiri.

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Gordon (Mulyadi, 2015:24) mengungkapkan bahwa implementasi berkaitan dengan aksi yang menjurus pada berjalannya program. Proses implementasi baru akan di mulai jika tujuan serta sasaran implementasi sudah di tetapkan, proses kegiatan dimulai apabila perencanaan dana telah di siapkan dan disalurkan agar pengimplementasian mencapai sasaran. Hal ini implementasi dapat di kaitkan dengan peraturan pemerintah atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan pemerintah atau kepentingan masyarakat.

Pemerintah merupakan organisasi negara yang memiliki kuasa untuk mengimplementasikan hukum bersama undang-undang untuk mengatur komunitas di setiap wilayah seperti instansi pemerintah Dinas Sosial Kota Bandung yang berperan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, serta masyarakat.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial. oleh karena itu, memerlukan tindakan pemerintah dalam penanganan kesejahteraan sosial kepada manusia gerobak untuk menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Merujuk konteks di atas, implementasi kebijakan perlu juga mengacu pada pandangan pakar agar setiap pengimplementasian kebijakan yang telah direncanakan harus di implementasikan dengan baik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan khususnya di Dinas Sosial Kota Bandung sangat di perlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah implementasi kebijakan, sebagaimana yang di jelaskan oleh Smith dalam (Tachjan 2006: 37-38). Implementasi di pandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini sebagai perubahan sosial serta politik, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan membuat perubahan dalam masyarakat sebagai target sasaran.

Berdasarkan studi kasus penelitian ini manusia gerobak selaku sasaran kelompok masyarakat berhak mendapatkan jaminan sosial yang di berikan oleh

pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang mempunyai peran untuk melindungi masyarakat yang lemah atau tidak mampu. Manusia gerobak di Indonesia yang di ciptakan bukan akibat dari budaya kemiskinan yang ditandai sebagai pemulung melainkan dari diskriminasi dari aspek pelayanan publik yang seharusnya mendapatkan hak-hak layanan sosial dari pemerintah.

Manusia gerobak merupakan manusia atau orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap atau yang menetap pada gerobaknya yang selalu berpindah pindah. Gerobak merupakan jantung dari manusia gerobak, yang dijadikan sebagai rumah sementara untuk berlindung dari panas dan hujan sebagai mana rumah yang seharusnya. Selain dijadikan rumah gerobak digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta menjadi tempat menyimpan barang-barang bekas sekaligus transportasi sehari-hari.

Fenomena manusia gerobak di Kota Bandung menjadi keresahan oleh pemerintah Kota Bandung. Hal ini mencerminkan kegagalan pemerintah Kota Bandung dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Maka sejumlah kebijakan yang di rumuskan oleh pemerintahan Kota Bandung untuk mengurangi jumlah manusia gerobak yang berkeliaran di jalanan Kota Bandung.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung melalui peraturan daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial. kebijakan tersebut harus implementasikan oleh pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial yang bertugas untuk

membantu pemerintah pusat Kota Bandung dalam bidang sosial dalam lingkup daerah Kota Bandung.

Dinas Sosial Kota Bandung berperan penting dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang di alami oleh manusia gerobak sebagai masyarakat. Dinas Sosial melalui program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang di keluarkan oleh Dinas Sosial untuk menanggulangi manusia gerobak mempunyai hambatan atau kesulitan serta tidak melakukan fungsi sosial sehingga mengakibatkan kebutuhan hidup tidak dapat terpenuhi secara wajar. Sehingga disebut penyakit masyarakat, penyimpangan sosial harus di tangani secara serius oleh Dinas Sosial Kota Bandung.

Melihat dari keadaan yang sebenarnya yang terjadi di Kota Bandung mengenai Implementasi kebijakan menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kota Bandung belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan beberapa permasalahan:

- 1) Kebijakan PMKS yang belum ideal terkhusus manusia gerobak mengakibatkan banyaknya manusia gerobak yang berdatangan ke kota Bandung serta maraknya manusia gerobak di jalanan.
- 2) Kurangnya komunikasi di antara Dinas Sosial terhadap manusia gerobak agar penertiban bisa berjalan dengan baik
- 3) Kurangnya sosialisasi program yang di berikan oleh Dinas Sosial kepada manusia gerobak.

Berdasarkan studi kasus permasalahan di lapangan yaitu fenomena manusia gerobak masih banyak yang berada di jalan dengan berbagai profesi pekerjaan, yang menjadi pemulung 465 orang, gelandangan 197 orang pada tahun 2019 dari sumber Dinas Sosial kota Bandung. Permasalahan tersebut sudah berbagai penanganan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dengan melakukan razia yang dilaporkan oleh warga, serta mengeluarkan program yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan memasang beberapa CCTV di titik-titik tertentu, meski program kerja sama ini masih dalam rancangan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Permasalahan-permasalahan yang di kemukakan di atas menjadi dorongan peneliti untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kota Bandung, dengan berdasarkan teori dari Smith dalam (Tachjan 2006: 37-38). yang memuat 4 komponen yang dapat mempengaruhi kinerja kebijakan yang saling berkaitan. Komponen yang dua maksud menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan yang dalam hal ini kebijakan yang harus ideal (*idealized policy*) dalam komponen ini pola interaksi yang ideal, selanjutnya sasaran kelompok/kebijakan (*target groups*) yaitu kelompok yang menjadi sasaran kebijakan oleh perumus kebijakan, di sisi lain harus ada pelaksana organisasi (*Iplementing organization*) yaitu badan-badan atau birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, serta faktor lingkungan (*enviromentas factor*) unsur-unsur lingkungan yang mempengaruhi oleh implementasi kebijakan

Berangkat dari ketertarikan yang didukung dengan pemahaman mendalam yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Publik dengan judul “Implementasi Kebijakan Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Studi Kasus Manusia Gerobak”.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari hasil kajian data yang diperoleh peneliti dan permasalahan yang di temui dengan difokuskan Implementasi Kebijakan Penyandang Menanggulangi Masalah Kesejahteraan Sosial khususnya manusia gerobak oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Dengan mengacu pada teori Implementasi kebijakan menurut Smith dalam (Tachjan 2006: 37-38), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: *idealized policy* (kebijakan ideal), *target groups* (kelompok sasaran), *implementing organization* (Badan-badan Pelaksana), dan *environmental factors* (Faktor Lingkungan).

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial kota Bandung terhadap fenomena manusia gerobak?

2. Faktor penghambat dalam Implementasi kebijakan menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Dinas Sosial kota Bandung terhadap fenomena manusia gerobak?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis bagaimana implementasi kebijakan menanggulangi permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Dinas Sosial kota Bandung.
- 2) Menganalisis faktor penghambat dalam implementasi kebijakan menanggulangi permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial kota Bandung.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan peneliti dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti memperoleh dan bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik umumnya, khususnya mengenai implementasi kebijakan menanggulangi permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Bandung.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat terutama bagi instansi yang terkait.

Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan alternatif pemecah masalah yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam mewujudkan menanggulangi permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung.